



**PENERAPAN LEMBAGA ACTIO PAULIANA PADA BOEDEL PAILIT
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN BAGI KREDITOR
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
NO. REG: 07/ PDT.SUS- ACTIO PAULIANA/
2015/ PENGADILAN NIAGA .MDN)**

ABSTRAK

Perusahaan yang melakukan perjanjian utang-piutang demi hukum menjadikan seluruh aset atau kekayaan perusahaan sebagai jaminannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kreditor apabila perusahaan tidak mampu untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui kepailitan apabila ternyata terdapat dua atau lebih kreditor. Kepailitan menyebabkan demi hukum ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata berlaku dalam proses penyelesaian permasalahan utang-piutang tersebut. Namun, terdapat kelemahan dari Pasal 1131 KUHPerdata yaitu terhadap hak kebendaan tertentu yang tidak diikat oleh jaminan secara khusus (gadai, hak tanggungan, dan fiducia), debitor tetap berhak untuk mengalihkan setiap kebendaan itu kepada pihak ketiga, artinya seberapapun besarnya utang yang dimiliki debitor, ia masih tetap mempunyai hak untuk mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain. Pada Pasal 1341 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 41 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimungkinkan untuk melakukan pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dikenal dengan *actio pauliana*. Oleh sebab itu pada penulisan hukum ini terdapat dua permasalahan yang akan dibahas yaitu *Pertama*, bagaimanakah penerapan lembaga *actio pauliana* dapat melindungi *boedel* pailit sebagai upaya perlindungan kepada kreditor dan *Kedua* mengapa masih sulit untuk melakukan pengajuan penerapan *actio pauliana* pada perkara kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* yaitu mengkaji peraturan perundangan dan teori-teori yang relevan untuk melihat penerapannya secara langsung. Adapun hasil dari penelitian yang penulis lakukan yaitu penerapan lembaga *actio pauliana* memberikan perlindungan kepada kreditor dengan dapat dikembalikannya seluruh aset kekayaan perusahaan yang telah dialihkan pada *boedel* pailit sehingga dapat digunakan untuk melunasi utang debitor kepada debitor secara *pro rata*. Penerapan lembaga *actio pauliana* memang masih sulit diterapkan karena proses pembuktian yang tidak mudah, jangka waktu pemeriksaan di pengadilan yang belum memadai dan timbulnya ketidakpastian hukum terkait pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *actio pauliana*.

Kata kunci : Kepailitan dan *Actio Pauliana*



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PENERAPAN LEMBAGA ACTIO PAULIANA PADA BOEDEL PAILIT SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN BAGI KREDITOR (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. REG: 07/PDT.SUS- ACTIO PAULIANA/ 2015/
PENGADILAN NIAGA .MDN)

RIRI LASTIAR S, Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

**“ The Application of *Actio Pauliana* Title On Insolvency Boedel As A
Protection For Creditors (Case Study of Commercial Court Decision
Reg. No 07/PDT.SUS-ACTIOPAULIANA/
2015/Pengadilan Niaga Medan)”**

ABSTRACT

The Company who have debt and credit agreements, by law, make all of the assets or property companies as assurance. This is accordance with the provisions of Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code which aims to provide protection to creditors if the company is unable to pay debts that have matured and can be billed. This problems can be solved through bankruptcy, if it turns out, there are two or more creditors. Bankruptcy by law, as it certainty in the provisions of Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code applicable in process of resolving debts and credit problems. However, the Article 1131 of the Civil Code has weakness which is about the particular's right material that is not bound by collateral specifically (pledge, encumbrance, and fiduciary), the debtor has retain's right to transfer any material to the third party, meaning that no matter how big debts owed by the debtor, he still has the right to transfer their property to other parties. On Article 1341 paragraph (1) of the Civil Code and Article 41 of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment give a possibility to cancel the legal act performed by a third party, known as *actio pauliana*. Therefore, in the writing of this law, there are two issues to be discussed, First, how the application of *actio pauliana* title on boedel bankruptcy can protect the creditors and Second why is difficult to apply *actio pauliana* in case of bankruptcy. This researched is used normative legal research methods by examining laws and theories which is relevant to the problem. The results showed that the application of *actio pauliana* title providing protection to creditors by returned of all the company's assets that have been transferred from boedel bankruptcy, so it can be used to pay off debt debtor in prorata parte. Application of *actio pauliana* title is still difficult to be applied in bankruptcy's case because it is not easy to prove it, the period of examination is not adequate and the emergence of legal uncertainty related to the competent court to examine, hear and decide the case *actio pauliana*.

Key words: bankruptcy and *actio pauliana*